



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB pada Perang Sipil
Chad (2007-2010)**

Skripsi

Oleh

Rayhan Murtaza

2013330076

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB pada Perang Sipil
Chad (2007-2010)**

Skripsi

Oleh

Rayhan Murtaza

2013330076

Pembimbing

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

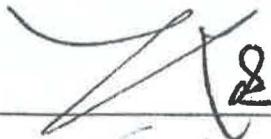
Nama : Rayhan Murtaza
Nomor Pokok : 2013330076
Judul : Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB pada Perang Sipil Chad
(2007-2010)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 20 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

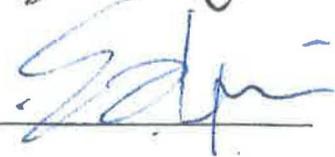
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Dr. Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

: 

Anggota
Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Murtaza
NPM : 2013330076
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB
pada Perang Sipil Chad (2007-2010)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 Juli 2018



Rayhan Murtaza

Abstrak

Nama : Rayhan Murtaza
NPM : 2013330076
Judul : Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB pada Perang Sipil Chad
(2007-2010)

Intervensi kemanusiaan adalah upaya dari satu negara atau sekelompok negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara yang sedang dilanda konflik. Ketika konflik yang sudah tereskalasi menjadi perang sipil terjadi di Chad, sekelompok negara yang tergabung ke dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengirim pasukan ke Chad di bawah nama Minurcat untuk melakukan upaya intervensi kemanusiaan. Namun di dalam prosesnya, salah satu negara anggota pasukan yaitu Prancis, memilih bertindak di luar aturan dengan membantu pemerintah Chad melawan pemberontak dari Sudan. Sementara perang sipil justru diakhiri oleh masing-masing pemerintah Chad dan Sudan yang dengan sendirinya memilih jalan damai tanpa sebuah mediator, peran yang seharusnya diisi oleh DK-PBB. Perlu diketahui bahwa Prancis adalah negara penyedia pasukan terbanyak untuk Minurcat dan Chad adalah salah satu negara Afrika yang sebelum kemerdekaannya merupakan bagian dari koloni Prancis. Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat DK-PBB gagal dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada perang sipil Chad. Kegagalan itu sendiri dapat dilihat jika pertama, kita dapat melihat bagaimana konflik tidak bisa diredam dan tereskalasi menjadi perang sipil. Kedua, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya DK-PBB bertindak untuk mengurangi krisis kemanusiaan di Chad. Ketiga, kita dapat melihat bagaimana hubungan sosial di antara aktor-aktor yang terlibat, jika didasarkan oleh identitas, kepentingan, tujuan dan bahasa.

Kata kunci: DK-PBB, Chad, intervensi kemanusiaan, perang sipil, hubungan sosial.

Abstract

Name : Rayhan Murtaza

NPM : 2013330076

Title : The Failure of UNSC's Humanitarian Intervention on Chadian

Civil War (2007-2010)

Humanitarian intervention is the efforts of one country or a group of countries to prevent human rights violations in a conflict-affected country. When the escalated conflict became a civil war in Chad, a group of countries joined into the United Nations Security Council (UNSC) sent troops to Chad under the name Minurcat to conduct humanitarian intervention efforts. But in the process, one of the troop member states, France, chooses to act outside the rules by helping the Chadian government against the rebels from Sudan. Meanwhile, the civil war was ended by the respective Chadian and Sudanese governments choosing the path of peace without a mediator, the role that should be filled by the UNSC. It is important to note that France is the largest source of troops for Minurcat and Chad is one of the African countries before independence was part of the French colony. This study will describe the factors that made the UN Security Council fail to do a humanitarian intervention at Chadian civil war. The failure itself can be seen if firstly, we can see how conflicts cannot be muted and escalated into civil war. Secondly, we can see how actually the UNSC is acting to reduce the humanitarian crisis in Chad. Thirdly, we can see how the social relations between actors are involved, if it is based on identity, interest, intention and language.

Keywords: UNSC, Chad, humanitarian intervention, civil war, social relations.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kehidupan serta pemikiran-pemikiran luar biasa kepada penulis hingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan.

Kepada Ane Rufiana dan Priyatna, kedua orang tua serta Uni Rufiany, kakak ibu saya, yang telah memberikan dukungan baik materil maupun spiritual hingga pada akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan.

Kepada Mas Paulus Yohanes Nur Indro, yang sudah saya anggap sebagai profesor politik saya, atas segala bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis hingga tulisan ini dapat disempurnakan dengan baik.

Kepada Mas Bob Sugeng Hadiwinata, yang sudah membantu saya dalam membuat arah skenario tulisan ini pasca seminar.

Kepada Mas Idil Syawfi dan Mba Elisabeth “Nophie” Satya Dewi, penguji-penguji yang luar biasa, yang sudah memberikan saran yang baik untuk tulisan ini.

Kepada adik saya Rahadian Nugraha dan teman-teman Bukit Jarian 54, terutama *gegedug*-nya yaitu Aryadiva Irsyadi dan Ray Joshua Jonathan, yang telah memberikan waktu dan tempat serta dukungan koneksi internet 24 jam yang sangat mendukung dalam penyusunan tulisan ini.

Kepada Hari Baku Pangestu, Ziljian Qisti, Raexsyaf Arrahman, Arbi Wardani dan Alqa Tahalli, yang sudah mewarnai sebagian besar kehidupan kuliah saya di luar kampus menjadi tidak “biasa saja”.

Kepada Bayu Rasyadi Putrautama, Reza Azeem Ridha, Grahito Sadanuputro, Indira Silvieana Budiarto, Iqbal Adianto, Teuku Ismail Fadhil dan Tania Dianda Budhiprameswari, yang sudah mewarnai pertengahan dan akhir kehidupan kuliah saya di luar kampus menjadi seru dan tidak terlupakan.

Kepada Coop-Space, yang sudah menjadi tempat *nongkrong* untuk saya dan sebagian teman-teman saya dari jurusan HI maupun jurusan lainnya dari angkatan 2010-2016 dan transit terbaik di sela dua kelas.

Kepada Natanael Alvin, satu-satunya teman yang bisa dan mau diajak sama-sama menyelesaikan tulisan masing-masing di perpustakaan kampus.

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	viii
1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2. Pembatasan Masalah	5
1.2.3. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Literatur.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	8
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
1.6.1. Metode Penelitian	17
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	18
1.7. Sistematika Pembahasan	18
2 PERANG SIPIL CHAD	
2.1. Penyebab Terjadinya Perang Sipil.....	20
2.2. Pertempuran Besar dan Krisis Kemanusiaan selama Perang Sipil.....	26
2.2.1. Serangan SCUD ke Guéréda	27
2.2.2. Serangan RDL ke Adré	27
2.2.3. Pertempuran Pertama di N'Djaména	28
2.2.4. Pertempuran Kedua di N'Djaména.....	29
2.2.5. Pertempuran di Am Zoer	30
2.2.6. Pertempuran di Am Dam.....	30
2.3. Kesepakatan Perdamaian Chad-Sudan.....	31
3 INTERVENSI KEMANUSIAAN DK-PBB PADA PERANG SIPIL CHAD	
3.1. Resolusi DK-PBB untuk Mengurangi Krisis Kemanusiaan di Chad.....	33
3.1.1. Resolusi 1778 (2007)	34
3.1.2. Resolusi 1834 (2008)	38
3.1.3. Resolusi 1861 (2009)	38
3.2. Resolusi DK-PBB Pasca Kesepakatan Perdamaian Chad-Sudan.....	40

3.3. Prancis dan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB di Chad	
3.3.1. Dominasi Prancis dalam Membentuk Minurcat	43
3.3.2. Keterlibatan Prancis dalam Memerangi Pasukan Pemberontak Chad	45
3.3.3. Kepentingan Ekonomi Prancis di Chad	46
4 FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DK-PBB DALAM MELAKUKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN PADA PERANG SIPIL CHAD	
4.1. Perang Sipil Chad dan Kegagalan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB	51
4.2. Penyalahgunaan Intervensi Kemanusiaan DK-PBB di Chad	54
4.3. Hubungan Sosial DK-PBB, Prancis dan Chad	66
5 KESIMPULAN	74
DAFTAR PUSTAKA	77

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Teori 3I + 1L	10
Gambar 1.2. Klasifikasi Konflik Berdasarkan Intensitasnya	15
Gambar 2.1. Peta Republik Chad	26
Gambar 3.1. Statistik Kuota Pasukan Minurcat	44
Gambar 3.2. Peta Proyek Pipa Minyak Chad-Kamerun	48
Gambar 3.3. Statistik Pertumbuhan Ekonomi Prancis 2000-2014	49

Daftar Tabel

Tabel 4.1. Hasil <i>Peacemaking</i> DK-PBB di Chad.....	57
Tabel 4.2. Hasil <i>Peacekeeping</i> DK-PBB di Chad	59
Tabel 4.3. Hasil <i>Peacebuilding</i> DK-PBB di Chad	61
Tabel 4.4. Konfigurasi 3I + 1L Hubungan Sosial DK-PBB, Prancis dan Chad.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Intervensi kemanusiaan merupakan suatu ancaman atau penggunaan kekuatan lintas batas negara oleh negara atau kelompok negara bagian yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran berat dan luas terhadap hak asasi manusia perorangan selain warganya sendiri, tanpa izin dari negara di mana kekuatan wilayah diterapkan.¹

Intervensi kemanusiaan berbeda dengan bantuan kemanusiaan, yang dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu antara negara pemberi dan penerima bantuan dan juga sangat memperhatikan kedaulatan negara dalam pelaksanaannya. Intervensi kemanusiaan menggunakan militer dalam prosedurnya, diinisiasi oleh satu atau lebih dari satu negara, dijalankan untuk menjaga warga sipil negara yang berada di tengah konflik dan tidak menghormati kedaulatan sebuah negara dalam menjalankan misi kemanusiaan.²

Intervensi kemanusiaan dianggap tidak menghormati kedaulatan negara. Sedangkan dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4, kedaulatan negara merupakan dasar dari hukum internasional. Maka bisa diklaim bahwa upaya intervensi kemanusiaan telah mengingkari hukum internasional dengan tidak menghormati

¹ Jeff L. Holzgrefe, Robert O. Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, halaman 18.

² Martin Griffiths, *International Relations: The Key Concepts*, Routledge, New York, 2002, halaman 145.

kedaulatan negara. Namun, dibalik hal tersebut ada hak dari orang-orang yang tidak terpenuhi di dalam suatu negara ketika sedang terjadi konflik dan intervensi kemanusiaan perlu dilakukan untuk setidaknya melindungi hak asasi manusia dan jika mampu, menghentikan konflik yang terjadi di dalam suatu negara.³

Kasus intervensi kemanusiaan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1978 ketika Vietnam memasuki wilayah Kamboja dan menghentikan genosida yang dipimpin Pol Pot yang telah berkuasa di Kamboja sejak 1975. Kemudian perdebatan mengenai legal atau tidaknya intervensi kemanusiaan mulai menurun pasca Perang Dingin. Penurunan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya konflik dan kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia dan beberapa negara di Afrika. Hal tersebut mengundang opini publik Amerika Serikat dan Eropa Barat yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Munculnya opini-opini tersebut merupakan keinginan masyarakat agar negara-negara penjunjung tinggi hak asasi manusia dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hak asasi manusia di Yugoslavia dan beberapa negara di Afrika yang tengah mengalami konflik internal. Melihat prosedur *peacekeeping* tradisional yang belum cukup efisien, intervensi kemanusiaan muncul sebagai respon untuk menyelesaikan masalah kejahatan kemanusiaan di dalam konflik internal.⁴

Pada awal tahun 2000-an, Chad, yang merupakan sebuah *landlocked state* yang terletak di Afrika bagian tengah dan terkurung oleh sesama negara-negara bekas jajahan Prancis dan juga beberapa negara jajahan Inggris yaitu Sudan (di

³ Ibid., halaman 145-146.

⁴ Ibid., halaman 146.

bagian timur), Libya (di bagian utara), Republik Afrika Tengah (di bagian selatan), Niger (di bagian barat), Kamerun dan Nigeria (di bagian barat daya),⁵ telah menjadi tuan rumah ratusan ribu pengungsi dari Sudan yang saat itu sedang mengalami perang sipil.⁶ Pada tahun 2005, perang sipil ini justru mewabah ke wilayah Chad karena Chad dan Sudan malah berseteru dalam sebuah perang *proxy*, dimana masing-masing negara mengirim tentara bayaran dan pemberontak ke ibukota satu sama lain.⁷ Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) tidak banyak membantu mengurangi krisis kemanusiaan pada perang sipil tersebut yang semakin memburuk.

1.2. Identifikasi masalah

1.2.1. Deskripsi masalah

Resolusi DK-PBB 1778 (25 September 2007) membentuk *Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad* (MINURCAT) dengan tujuan utama menciptakan kondisi untuk memungkinkan kembalinya orang-orang terlantar dan penyediaan bantuan kemanusiaan secara sukarela di Chad dan Republik Afrika Tengah selama perang sipil berlangsung. Mandat awal Minurcat berfokus pada penghubungan dengan semua pihak, termasuk menasihati polisi Chad untuk memantau dan mempromosikan hak asasi manusia dan peraturan hukum. Resolusi 1778 juga memberi wewenang untuk *European Union Force*

⁵ Mario J. Azevedo, *The Roots of Violence: A History of War in Chad*, Gordon and Breach, Sydney, 1998, halaman 3.

⁶ Alex de Waal, "Who are the Darfurians? Arab and African identities, violence and external engagement", *African Affairs* 104, No. 415, 1 April 2005, halaman 181–205.

⁷ Simon Massey, Roy May, "Commentary: The Crisis in Chad", *African Affairs* 105, No. 420, 1 Juli 2006, halaman 43–49.

Chad / CAR (EUFOR Chad / CAR) satu tahun di bawah mandat Bab VII untuk memantau gencatan senjata antara pemerintah dan pasukan pemberontak, beberapa di antaranya yang didukung oleh Sudan, mengawasi pelaksanaan perjanjian damai dan terus mencegah kekerasan di wilayah tersebut. Untuk alasan ini, operasi difokuskan pada Chad timur di sepanjang perbatasan Sudan dan Republik Afrika Tengah timur laut. Khususnya, baik Minurcat maupun Eufor menyertakan mandat politik yang baik dan sesuai dengan keinginan Chad.⁸

Uni Eropa memberi wewenang Eufor melalui *EU Council Joint Action 2007/677/CFSP* (15 Oktober 2007) untuk mendukung Minurcat, melindungi warga sipil dan personil PBB dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan, terutama untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Sementara banyak negara Eropa menyumbangkan pasukan ke Eufor, Prancis menyumbangkan pasukan yang lebih banyak daripada negara lain. Markas operasional untuk misi tersebut bahkan berbasis di Prancis.⁹

Perang *proxy* antara Sudan dan Chad antara tahun 2005-2008 memiliki beberapa konsekuensi untuk perhitungan Presiden Idriss Déby. Pertama, perlombaan senjata sangat mahal bagi kedua negara, terutama pada saat harga minyak turun. Kedua, serangan timbal balik pada ibu kota satu sama lain telah mengungkap kerentanan mereka. Ketiga, kegagalan Eufor dan militer Prancis untuk melindungi Déby dari kekalahan pada bulan Februari 2008 menunjukkan secara dramatis bahwa pasukan kemanusiaan bukanlah jaminan terhadap kelangsungan rezim. Pilihan yang terbuka adalah melanjutkan *status quo* sebelum

⁸ Alex J. Bellamy, Paul Williams, *Understanding Peacekeeping*, Polity, Cambridge, 2010, halaman 382.

⁹ *Ibid.*, halaman 151.

tahun 2003: sebuah perjanjian keamanan dengan Sudan. Untungnya, bekas sekutu Déby, Omar al-Bashir memiliki banyak kepentingan dan perhitungan yang sama. Setelah pertemuan bilateral antara Presiden Déby dan Presiden Bashir, dimana mereka sepakat untuk menghentikan destabilisasi timbal balik dan melanjutkan kerja sama keamanan, Chad dengan tiba-tiba menuntut penarikan Minurcat dalam sebuah catatan secara verbal ke DK-PBB pada tanggal 15 Januari 2010.¹⁰

1.2.2. Pembatasan Masalah

Cakupan dari kajian ini akan melingkupi periode 2007 hingga 2010, karena periode tersebut adalah rentang waktu dimana DK-PBB dibawah pasukan Minurcat dan Eufor berada di wilayah Chad untuk melakukan intervensi kemanusiaan ketika perang sipil masih berlangsung.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah serta identifikasi dan pembatasan masalah maka pertanyaan riset yang akan dikaji dari penelitian ini adalah; **Faktor-faktor apa yang menyebabkan DK-PBB gagal dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada Perang Sipil Chad?**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah maka penelitian ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan DK-PBB gagal dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada perang sipil Chad.

¹⁰ Celeste Hicks, “*Clay Feet: Chad’s Surprising Rise and Enduring Weaknesses*”, *World Politics Review*, 13 November 2014, halaman 1-20.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi kepada kepastakaan ilmu Hubungan Internasional mengenai kegagalan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada perang sipil Chad. Kasus ini dideskripsikan dengan adanya kebijakan dari DK-PBB, Prancis dan Chad dan kekerasan yang telah terjadi secara fisik selama perang sipil di Chad berlangsung.

1.4. Kajian Literatur

Berikut adalah dua karya literatur yang akan dijadikan pedoman oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu menentukan arah dari penelitian ini.

Menurut jurnal Félix Arteaga yang berjudul “*The Chad Conflict, United Nations (Minurcat) and the European Union (Eufor)*”, PBB dan Uni Eropa harus meninjau konsep-konsep operasi yang sangat penting di Chad. Selain resiko kemanusiaan, ada resiko perang sipil di Chad dan resiko perang lintas batas antara Chad dan Sudan. Konflik ini membuat perlindungan kemanusiaan tidak bisa lepas dari resiko perang. Selama ketegangan antara Chad dan Sudan tidak dijinakkan, Darfur akan terus menjadi tempat berkembang biaknya pemberontakan dan penderitaan. Namun situasi telah berubah ketika peluncuran operasi kemanusiaan setelah sebuah kesepakatan lokal diikuti oleh bentrokan antara para pihak yang mengubah kerangka kerja Minurcat dan Eufor. Tentu saja operasi tersebut akan didukung oleh pemerintah Chad dan kelompok-kelompok yang menentang Sudan, selama mereka tidak menganggap bahwa pasukan Minurcat dan Eufor menawarkan perlindungan yang sama kepada saingan mereka. Namun hal ini akan

ditentang oleh pasukan pemberontak - yang telah membuat demonstrasi untuk memperingatkan oposisi mereka - dan momok dukungan Prancis untuk rezim Déby menimbulkan keraguan tentang keberpihakan PBB dan Uni Eropa di dalam konflik tersebut. Misi internasional masih sangat diperlukan dan telah ada upaya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, namun jendela peluang itu harusnya telah ditutup.¹¹

Menurut jurnal Hylke Dijkstra yang berjudul "*The Military Operation of the EU in Chad and the Central African Republic: Good Policy, Bad Politics*", Operasi untuk menjembatani dan memberikan intervensi kemanusiaan adalah konsep yang menjanjikan. Selama perencanaan operasi tersebut, PBB dan Uni Eropa juga mencapai tonggak sejarah baru dengan misi pencarian fakta bersama. Hal ini memiliki efek nyata dalam hal pendekatan komprehensif, yang meramalkan tidak hanya kehadiran militer, tapi juga pelatih polisi. Di tingkat militer, Uni Eropa berhasil menyebar di daerah operasi yang sangat terpencil dengan cara yang sederhana. Kendati demikian, operasi tersebut dirusak oleh masalah-masalah yang bersifat politis. Eufor menyebabkan perpecahan yang signifikan antara negara-negara anggota dan menciptakan ketegangan dalam hubungan dengan PBB. Karena masalah di dalam Uni Eropa tentang Eufor, operasi militer besar-besaran di Afrika dalam waktu dekat menjadi tidak mungkin terjadi. Selain itu, Uni Eropa tidak mungkin merencanakan operasi dengan asumsi bahwa PBB akan memberikan misi pelatihan polisi paralel. Operasi penjangkauan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan di masa depan hanya jika Uni Eropa

¹¹ Félix Arteaga, "The Chad Conflict, United Nations (MINURCAT) and the European Union (EUFOR)", Elcano Royal Institute, 10 Maret 2008.

memiliki komitmen yang kuat tentang tindak lanjut militer. Namun, mengingat banyak negara enggan untuk menjadi tuan rumah pasukan kemanusiaan PBB, PBB mungkin tidak akan memberikan komitmen yang kuat terlebih dahulu.¹²

1.5. Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional adalah sebuah kontribusi besar untuk pemikiran yang umumnya terkait dengan segala bidang kehidupan internasional. Dalam dinamikanya sebagai ilmu sosial, Hubungan Internasional terus bertumbuh, mengalami perkembangan dan mengetengahkan penyesuaian-penyesuaian baru.¹³

Aktor yang berada di dalam Hubungan Internasional tidak hanya negara tetapi juga ada organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi dengan keanggotaan yang ruang lingkungannya berskala internasional. Organisasi internasional terbagi menjadi dua yakni *international non-governmental organizations* seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan *intergovernmental organizations* seperti PBB dengan Dewan Keamanan-nya.¹⁴

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kepentingan, Hubungan Internasional yang bersifat dinamis pun semakin memiliki cakupan yang meluas. Hubungan Internasional mencakup segala fenomena sosial yang terjadi dalam paradigma global. Fenomena-fenomena tersebut dapat diklasifikasikan, diatur dan dipahami melalui teori-teori Hubungan Internasional. Teori-teori tersebut dapat menjelaskan bagaimana sebuah fenomena atau fakta yang terjadi melalui berbagai

¹² Hylke Dijkstra, "The Military Operation of the EU in Chad and the Central African Republic: Good Policy, Bad Politics", *International Peacekeeping*, Vol. 17, No. 3, 2010, halaman 395-407.

¹³ Cynthia Weber, *International Relations Theory: A Critical Introduction*, Routledge, London, 2005, halaman 3.

¹⁴ Graham Evans, Richard Newnham, *Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin, London, 1998, halaman 270.

macam perspektif maupun sudut pandang yang tersusun secara teoritis.¹⁵

Untuk memahami kasus yang diteliti, dalam studi Hubungan Internasional, ada yang disebut dengan perspektif Konstruktivisme. Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme adalah perspektif struktural dari sistem internasional yang membuat klaim inti sebagai berikut: (1) menyatakan negara adalah unit analisis utama untuk teori politik internasional; (2) struktur kunci dalam sistem negara bersifat intersubjektif dan (3) identitas dan kepentingan negara berada dalam bagian penting pada pembangunan struktur sosial.¹⁶

Lebih lanjut, Wendt dalam tulisannya yang berjudul “*Constructing International Politics*” mencetuskan konsep struktur sosial dalam konstruktivisme, terdiri dari dua klaim yaitu struktur dasar politik internasional lebih ke arah sosial ketimbang material dan struktur kebudayaan membentuk identitas dan kepentingan aktor ketimbang hanya perilakunya saja.¹⁷

Friedrich Kratochwil menambahkan bahwa struktur sosial dari perspektif Konstruktivisme tidak hanya dibangun oleh identitas (*identity*) dan kepentingan (*interest*) saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Alexander Wendt, tetapi juga dibangun oleh tujuan (*intention*) dan bahasa (*language*).¹⁸ Kemudian dari proses pembelajaran dan interaksi antar subjek ini disusun menjadi sebuah teori yang disebut dengan 3I + 1L,¹⁹ dimana membaik atau tidaknya sebuah hubungan sosial

¹⁵ Weber, *International Relations Theory*, halaman 3.

¹⁶ Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and the International State,” *The American Political Science Review*, Vol. 88, No.2, Juni 1994, halaman 385.

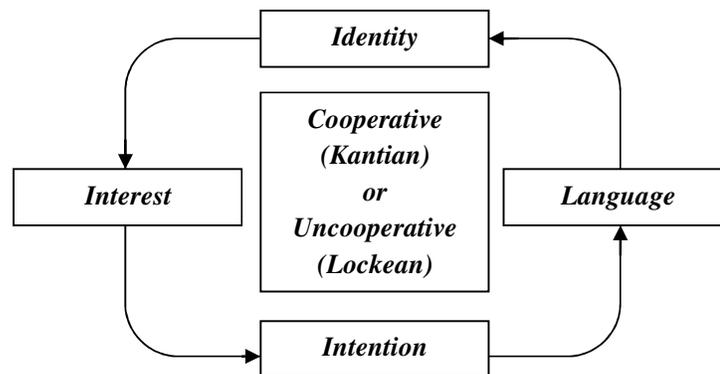
¹⁷ Alexander Wendt, *Constructing International Politics*, International Security, MIT Press, Cambridge, Volume 20, No. 1, 1995, halaman 71-81.

¹⁸ Friedrich V. Kratochwil, *Rules, Norms, and Decisions*, Cambridge University Press, New York, 1989, halaman 6-8.

¹⁹ Bob S. Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif dan Reflektif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, halaman 272-273.

di antara aktor-aktor dapat dilihat dari semakin tinggi atau tidaknya kesamaan identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), tujuan (*intention*) dan bahasa (*language*) mereka.

Gambar 1.1. Teori 3I + 1L



Sumber: olahan penulis berdasarkan pemikiran Alexander Wendt dan Friedrich Kratochwil

Menurut Wendt, karakter kehidupan internasional ditentukan oleh keyakinan dan harapan yang dimiliki negara tentang satu sama lain dan ini didasari oleh struktur sosial daripada struktur material. Ini berarti bahwa makna dan efeknya bergantung pada struktur sosial dari sistem dan secara khusus yaitu tiga budaya anarki yang dominan - *Hobbesian*, *Lockean*, atau *Kantian*.²⁰ Teori yang dibentuk oleh Kratochwil hanya memakai budaya *Lockean* dan *Kantian* dalam mendeskripsikan perilaku negara-negara yang disebut sebagai para aktor.

Wendt menganggap budaya *Lockean*, yang diambil dari pemikiran John Locke, adalah budaya yang mengedepankan persaingan di antara negara-negara.

²⁰ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, New York, 1999, halaman 20.

Tidak seperti permusuhan yang ditawarkan oleh budaya *Hobbesian* dari yang diambil dari pemikiran Thomas Hobbes, persaingan mengharapkan negara-negara untuk bertindak seolah-olah mereka mengakui kedaulatannya masing-masing dan tidak membuat mereka untuk mencoba menaklukkan atau mendominasi satu sama lain. Bagaimanapun, pengakuan kedaulatan di antara negara-negara tersebut tidak meluas ke hak untuk bebas dari kekerasan di dalam perselisihan.²¹

Sementara Wendt menganggap budaya *Kantian*, yang diambil dari pemikiran Immanuel Kant, adalah budaya yang mengedepankan kerjasama di antara negara-negara dan hal tersebut telah menjadi norma di dalam budaya politik internasional, karena di dalam norma tersebut: (1) negara-negara diharapkan untuk memperhatikan aturan yang bebas tetapi sama-sama diperlukan oleh mereka, (2) keamanan nasional masing-masing negara menjadi satu-satunya prioritas di dalam kerjasama mereka dan (3) harapan untuk menjaga kerjasama negara-negara tersebut akan terus berlanjut.²²

Untuk memahami intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh DK-PBB dapat dipahami melalui tiga definisi konseptual. Pertama, DK-PBB sebagai *intergovernmental organization* adalah entitas yang dibuat dengan struktur organisasi dan otonomi yang cukup untuk menyediakan proses multilateral, pengambilan keputusan secara formal antar negara, bersama dengan kapasitas untuk melaksanakan kehendak kolektif para anggotanya yaitu negara.²³

²¹ Ibid., halaman 279.

²² Ibid., halaman 297-299.

²³ Thomas J. Volgy, "Identifying Formal Intergovernmental Organizations", *Journal of Peace Research*, Vol. 45, No. 6, 2008, halaman 849-862.

Kedua, tiga karakteristik dasar dari apa yang disebut dengan intervensi kemanusiaan yang seharusnya dilakukan oleh DK-PBB menurut Alton Frye, yaitu:

- 1) intervensi kemanusiaan melibatkan ancaman dan penggunaan kekuatan militer sebagai ciri utama,
- 2) intervensi kemanusiaan adalah sebuah intervensi dalam arti bahwa hal itu memerlukan campur tangan dalam urusan internal sebuah negara dengan mengirim pasukan militer ke wilayah atau wilayah udara sebuah negara berdaulat yang tidak melakukan tindakan agresi terhadap negara lain,
- 3) intervensi tersebut bukan suatu tanggapan terhadap situasi yang dimana kepentingan negara-negara yang melakukan intervensi terancam, tetapi merupakan suatu tanggapan yang secara murni didorong oleh tujuan kemanusiaan.²⁴

Ketiga, ada tiga pendekatan menuju perdamaian yang dibuat oleh Johan Galtung, yaitu *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* adalah sebuah tindakan dimana para aktor antagonis di dalam konflik harus dijauhkan satu sama lain di bawah ancaman timbal balik dengan hukuman yang cukup besar agar tidak saling melampaui batas wilayah masing-masing. *Peacemaking* adalah sebuah tindakan dimana para aktor harus disatukan ke dalam formasi, mobilisasi dan organisasi baru untuk mentransformasi sikap dan asumsi mereka terhadap konflik. *Peacebuilding* adalah sebuah situasi dimana struktur

²⁴ Alton Frye, *Humanitarian Intervention: Crafting a Workable Doctrine*, Council on Foreign Relations, New York, 2000, halaman 3-5.

yang dapat menghapus penyebab konflik dan menawarkan alternatif pencegah kemungkinan perang di masa mendatang harus ditemukan.²⁵

Konsep dari Galtung ini kemudian diadaptasi kembali oleh Sekretaris Jendral PBB Boutros Boutros-Ghali dalam sebuah agenda yang disebut dengan “*An Agenda for Peace*” pada tahun 1992. Sementara Galtung berfokus untuk menciptakan perdamaian positif, Boutros-Ghali lebih spesifik dalam menyerukan PBB untuk membangun kembali lembaga-lembaga dan infrastruktur negara-negara yang dirusak oleh suatu konflik dan membangun ikatan saling menguntungkan yang damai di antara negara-negara yang sebelumnya berkonflik.

Di dalam agenda tersebut, Boutros-Ghali memperkenalkan empat bidang tindakan, yang diambil bersama-sama, disajikan sebagai kontribusi yang koheren menuju pengamanan perdamaian:

- 1) diplomasi preventif adalah tindakan untuk mencegah perselisihan timbul di antara para pihak, untuk mencegah perselisihan yang ada dari meningkat menjadi konflik dan untuk membatasi penyebaran yang kedua ketika terjadi,
- 2) upaya perdamaian (*peacemaking*) adalah tindakan untuk membawa pihak-pihak yang tidak setuju pada kesepakatan, pada dasarnya melalui cara-cara damai seperti yang diramalkan di dalam Bab VI Piagam PBB,
- 3) pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*) adalah penempatan kehadiran militer dan sipil PBB di lapangan untuk memperluas kemungkinan bagi pencegahan konflik dan upaya perdamaian,

²⁵ Johan Galtung, *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research; Vol. 2*, Eljers, Copenhagen, 1976, halaman 282-304.

- 4) pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang cenderung akan memperkuat dan memantapkan perdamaian untuk menghindari pengulangan konflik.²⁶

Dalam memahami konflik, menurut *Heidelberg Institute for International Conflict Research*,²⁷ konflik adalah perbedaan posisi antara setidaknya dua aktor yang terlibat langsung dan tegas mengenai nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat termasuk wilayah, pemisahan diri, dekolonisasi, otonomi, sistem atau ideologi, kekuatan nasional, dominasi regional, kekuatan internasional dan sumber daya. Konflik dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang dapat diobservasi dan berada di luar prosedur pengaturan yang ditetapkan. Selain itu, konflik dapat mengancam fungsi inti negara, tatanan internasional, atau memegang prospek untuk melakukan hal tersebut. Secara metodologis dan ideologis, esensi dari konflik itu sendiri terletak pada kontradiksi yang diwakili oleh konsep perbedaan posisi. Perbedaan posisi adalah ketidakcocokan gagasan dan keyakinan yang dirasakan. Ini mensyaratkan kehadiran tiga elemen berikut:

1. Harus ada setidaknya dua entitas yang memiliki kapasitas intelektual dan visi, dan yang mampu berkomunikasi. Entitas seperti itu disebut aktor.
2. Agar para aktor merasakan ketidakcocokan antara ide dan keyakinan mereka, harus ada tindakan dan komunikasi timbal balik antara aktor tersebut.

²⁶ Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, United Nations, New York, 1992, Bagian II No. 20-21.

²⁷ Heidelberg Institute for International Conflict Research, "Conflict Barometer 2017", Februari 2018, halaman 6-8.

3. Komunikasi selalu mengacu pada masalah tertentu, tindakan selalu mengacu pada objek tertentu.

Gambar 1.2. Klasifikasi Konflik Berdasarkan Intensitasnya

Intensity	Terminology	Level of violence	Intensity class
1	Dispute	Non-violent conflicts	Low intensity
2	Non-violent crisis		
3	Violent crisis	Violent conflicts	Medium intensity
4	Limited		High intensity
5	War		

Sumber: *Heidelberg Institute for International Conflict Research*

Jika konflik diklasifikasikan, maka setiap jenisnya memiliki intensitas dan terminologi tersendiri. Di dalam klasifikasi tersebut terdapat tiga kelas intensitas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Di kelas intensitas rendah terdapat dua terminologi yaitu sengketa (*dispute*) dan krisis non-kekerasan (*non-violent crisis*). Sengketa bisa disebut sebagai konflik yang berintensitas rendah jika telah memenuhi tiga elemen dari konsep perbedaan posisi. Sementara krisis non-kekerasan bisa disebut sebagai konflik yang berintensitas rendah jika kekerasan fisik secara implisit atau eksplisit mengancam manusia dan properti oleh setidaknya salah satu aktor. Di kelas intensitas sedang terdapat satu terminologi

yaitu krisis kekerasan (*violent crisis*). Krisis kekerasan bisa disebut sebagai konflik yang berintensitas sedang jika kekerasan fisik terhadap manusia dan properti sudah dapat diterima. Di kelas intensitas tinggi terdapat dua terminologi yaitu perang terbatas (*limited war*) dan perang (*war*). Perang terbatas bisa disebut sebagai konflik yang berintensitas tinggi jika setidaknya satu aktor menggunakan kekuatan yang terbatas untuk menghancurkan manusia dan properti. Pembatasan kekuatan dilakukan karena seluruh kekuatan yang ada akan dihabiskan untuk tujuan yang lebih besar dari perang terbatas ini yaitu perang. Sementara perang bisa disebut sebagai konflik yang berintensitas tinggi jika setidaknya satu aktor menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan manusia dan properti.

Terminologi perang tersebut berkaitan dengan definisi perang sipil menurut Ann Hironaka, dimana perang sipil juga adalah konflik yang berintensitas tinggi karena sering melibatkan angkatan bersenjata reguler, yang berkelanjutan, terorganisasi dan berskala besar. Perang sipil juga dapat mengakibatkan sejumlah besar korban dan konsumsi sumber daya yang signifikan.²⁸

Sementara menurut Michael Doyle dan Nicholas Sambanis, ada tujuh kriteria yang terpenuhi oleh suatu konflik bersenjata sehingga konflik tersebut bisa disebut sebagai perang sipil. Konflik di Chad sendiri telah memenuhi tujuh kriteria berikut:

- 1) konflik di Chad telah menyebabkan lebih dari seribu kematian secara keseluruhan;

²⁸ Ann Hironaka, *Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil War*, Harvard University Press, Cambridge, 2005, halaman 3.

- 2) konflik di Chad setidaknya berlangsung selama satu tahun;
- 3) konflik di Chad telah menantang kedaulatan negara yang diakui secara internasional;
- 4) konflik di Chad terjadi di dalam batas yang diakui dari negara tersebut;
- 5) konflik di Chad melibatkan negara tersebut sebagai pejuang utama;
- 6) konflik di Chad melibatkan pemberontak dengan kemampuan untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara tersebut;
- 7) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Chad memiliki prospek hidup bersama di satu unit politik yang sama setelah akhir konflik.²⁹

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Melihat relasi antara kerangka pemikiran yang dipakai dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif menekankan pentingnya pemahaman melalui makna perilaku manusia dari konteks sosial, politik dan budaya dimana sebuah interaksi berlangsung. Metode ini juga bertumpu pada fakta, realitas dan menjadikan teori sebagai bahan referensi untuk membuktikan betapa pentingnya penelitian ini dibuat.³⁰ Kemudian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, dimana adanya

²⁹ Michael W. Doyle, Nicholas Sambanis, "International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis", *The American Political Science Review*, Vol. 94, No. 4, Desember 2000, halaman 10.

³⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, California, 2002, halaman 20.

pengembangan atas pendalaman dan pemahaman definisi subjek penelitian terhadap dunia.³¹

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta laporan-laporan resmi baik dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan topik ini, serta dari media cetak dan elektronik.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab satu sebagai pendahuluan kasus yang diteliti dimana terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah yang dibagi menjadi deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang di dalamnya terkandung pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data yang dibagi menjadi metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, serta terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua akan memaparkan sejarah dan fakta dinamika politik di Chad dari sebelum hingga berakhirnya perang sipil. Bab ini akan mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perang sipil, bagaimana krisis kemanusiaan terjadi dan agresi yang dilakukan oleh pemerintah Chad di dalam perang sipil diartikan sebagai bentuk justifikasi untuk mempertahankan kedaulatan Chad

³¹ Robert Bogdan, Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Wiley Interscience Publication, New York, 1975, halaman 4-9.

hingga sampai ke dalam kesepakatan perdamaian.

Bab tiga akan memaparkan intervensi kemanusiaan DK-PBB pada perang sipil Chad. Bab ini akan mendeskripsikan inti dari resolusi yang dikeluarkan oleh DK-PBB untuk mengurangi krisis kemanusiaan pada perang sipil dan peran pemerintah Prancis di dalam intervensi kemanusiaan tersebut.

Bab empat akan berfokus mendeskripsikan penyebab kegagalan DK-PBB gagal dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada perang sipil Chad. Bagian pertama akan melihat bagaimana fakta terjadinya perang sipil Chad menjadi bukti kegagalan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Kedua, akan menganalisis adanya penyalahgunaan di dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh DK-PBB di Chad. Kemudian ketiga, akan menganalisis hasil dari hubungan sosial di antara pasukan DK-PBB, Prancis dan Chad.

Bab lima merupakan kesimpulan dari analisis yang telah dipaparkan dalam bab empat dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian.